

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).¹

Secara garis besar demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan². Definisi umum ini setidaknya, sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Josep Schumpeter³ dalam buku klasiknya, *Capitalism, Socialism, and Democracy* yang mengatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama (*the will of the people and the common good*).

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2013), cetakan ketiga, h. 134.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demookrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 33.

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demookrasi...* h. 33.

Secara sederhana definisi demokratisasi dapat diartikan sebagai suatu transformasi atau proses untuk mencapai suatu sistem yang demokratis. Sedangkan makna dan substansi kata demokrasi itu sendiri berarti secara sederhana pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam arti yang (*relative*) agak luas demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu jalannya kepolitikan dan pemerintahan. Oleh karena demokrasi merupakan sistem yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, maka nihil terhadap daulat elite, atau daulat partai, atau daulat negara, ataupun daulat militer sejatinya mesti disingkirkan.⁴

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cermin pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyat yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara...* h. 53.

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilihan umum masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat yang melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.⁵

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Partisipasi adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-Nya, dan sebagainya.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Neagara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.329.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan masyarakat akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan sedikit banyaknya masyarakat dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, masyarakat percaya bahwa kegiatan yang masyarakat lakukan mempunyai efek politik (*political efficacy*).

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena dengan masyarakat memberikan hak suaranya, kepentingan masyarakat akan diperhatikan.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Dan dikhawatirkan jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap

terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.⁶

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan adanya teknologi *smartphone* yang ditanamkan didalamnya aplikasi media sosial menjadi alternatif bagi publik untuk mengekspresikan sikap dan opininya. Dalam pilkada yang membutuhkan sosialisasi guna membantu dan memberikan pemahaman pilkada menjadi semakin kompleks karena melibatkan teknologi komunikasi baru yang semakin marak digunakan masyarakat modern. Waktu yang dihabiskan dengan media sosial banyak yang menggeser penggunaan waktu untuk media massa konvensional. Akibatnya karakteristik media sosial yang cepat, interaktif, *portable* dan transparan, mempengaruhi pula pola-pola sosialisasi hingga terbentuknya budaya baru.

Media massa khususnya televisi dan surat kabar, dan juga internet akan menjadi media utama dalam meningkatkan citra diri politisi, khususnya melalui kampanye politik menjelang pemilihan legislatif di pusat dan daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan bahkan menjelang pemilihan kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Mereka akan menjadi anggota jejaring sosial terkemuka, khususnya *twitter* dan *facebook* dan menarik pengikut sebanyak-banyaknya, untuk meraih dukungan khalayak guna menduduki jabatan yang mereka inginkan, terlepas dari apakah pengelolanya adalah diri mereka sendiri atau penjaga gawang (*gate keeper*) yang khusus digunakan untuk itu.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...* h. 367-369.

Media kontemporer seperti internet, dan khususnya media sosial, akan semakin penting dalam komunikasi politik, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global. Sejalan dengan itu konsep-konsep baru seperti *e-democracy* dan *e-government*, di negara ini akan terus berkembang, meskipun kekurangan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan belum lengkap. Gates⁷ menegaskan gagasan-gagasan tentang jaringan dan interaktivitas telah mendominasi wacana politik kontemporer, dan iklim politik terkini ditandai antara lain oleh obsesi terhadap serangkaian problem teknologi atau keasyikan teknologi, mulai dari produktivitas riset, persaingan teknologi, dan perlindungan kepemilikan intelektual, hingga ke pemahaman publik atas sains, efek teknologi yang tidak terduga, dan kebutuhan akan pelatihan teknik yang berkelanjutan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang pesat.

Lebih dari satu dekade lalu, Blumler dan Kavanagh⁸ (1999) mendiagnosis suatu era ketiga komunikasi politik yang ditandai dengan melimpahnya media, bertambahnya tekanan terhadap elite politik untuk menerima aturan permainan media, dan semakin kritisnya warga negara yang menantang otoritas politik dan kepemimpinan media. Munculnya web 2.0 dengan sifat interaktif dan media sosial telah membawa peluang baru dan tantangan baru bagi komunikasi politik, yang secara mendasar mengubah hubungan antara penguasa dan warga negara dalam demokrasi modern yang melampaui era ketiga.

⁷ Deddy Mulyana, *Komunikasi politik, Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 24.

⁸ Deddy Mulyana, *Komunikasi politik...* h. 25.

Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus akan informasi apapun.⁹

Upaya untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum antara lain dilakukan dengan peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁰

Pertama, mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis.

Kedua, mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen.

Ketiga, mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi.

Keempat, menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik

⁹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 71-72.

¹⁰ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi...* h. 265-266.

untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas.

Kelima, menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di plosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa.

Keenam, memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.

Ketujuh, meningkatkan peran lembaga independen dibidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.

Seperti halnya tahun lalu dilaksanakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 yang dipilih secara langsung, khususnya masyarakat Desa Petir memberikan hak suaranya. Seperti yang diketahui calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang terdiri dari dua pasangan calon yaitu Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M. Ak dengan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si dengan nomor urut 1, dan Ahmad Syarif Madkurulah, SH dengan Aep Syaefullah dengan nomor urut 2. Sebelum dilaksanakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, para calon Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan kampanye terlebih dahulu yang telah dijadwalkan oleh KPUD. Para calon Bupati dan Wakil Bupati berkampanye dengan cara masing-masing untuk menarik perhatian masyarakat. Kegiatan

kampanye tersebut dibagi ke dalam beberapa kegiatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga kampanye;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Kampanye yang dilakukan salah satunya menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Seperti mengunggah poster-poster di media sosial yaitu twitter, facebook, instagram, path, dan lain-lain yang berhubungan dengan media sosial.

Dari latar belakang dan masalah di atas maka penulis bermaksud penelitian dengan judul **“Peran Media Sosial (Facebook) Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Petir Dalam Pemenangan Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati”**.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 “Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan agar penelitian ini terfokus kepada permasalahan yang akan dibahas. Dalam skripsi ini penulis berfokus penelitian kepada masyarakat desa Petir yang berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Media Sosial Terhadap Penunjang Pilkada Pada Desa Petir ?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Desa Petir Terhadap Pilkada Bupati Kabupaten Serang Tahun 2015 Melalui Media Sosial ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Media Sosial Terhadap Penunjang Pilkada Pada Desa Petir.
2. Untuk Mengetahui Respon Masyarakat Desa Petir Terhadap Pilkada Bupati Kabupaten Serang Tahun 2015 Melalui Media Sosial.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian adalah:

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial, dan menjadi bahan untuk peneliti yang akan datang yang berkaitan dengan peran media sosial (*facebook*) dalam meningkatkan partisipasi politik.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan mengenai peran media sosial (*facebook*) dalam meningkatkan partisipasi politik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama	Skripsi Terdahulu
1	Amirul Hasan (103033227779), 2007 Pengaruh Media Terhadap Tingkat Partisipasi Politik (Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Ciputat Pada Pilkada Propinsi Banten Tahun 2006) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Metode penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bersumber pada data-data matematis dan serangkaian observasi dan pengukuran yang dinyatakan dalam angka. Dari hasil penelitian tingkat penerima masyarakat Ciputat terhadap media-media yang memuat

2	<p>Jakarta</p> <p>Achmad Furqon (109051000047), 2013 Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Secara Ekspresi Simbolik Di Media Sosial Jelang Pemilu 2014 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>informasi pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten tahun 2006 berada pada angka 23,6 atau sedang.</p> <p>Tingkat partisipasi politik masyarakat Ciputat pada pelaksanaan Pilkada Provinsi banten tahun 2006 berada pada angka 16,5 atau rendah.</p> <p>Adapun korelasi antara kedua variabel (media dan partisipasi politik) berada pada angka 0,35, atau dengan kata lain korelasi pada kedua variabel tersebut rendah. Adapun kontribusi media dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Ciputat Pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten tahun 2006 sebesar 12,2 %.</p> <p>Metode penelitian yang di gunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (<i>natural setting</i>) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Peneliti</p>
---	---	--

		<p>menggunakan pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam tataran praktis.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian strategi iklan kampanye politik PKS jika dilihat dari teori semiotik Sanders Pierce terdiri dari ikon, indeks dan simbol. Namun jika dilihat dari isi strategi kreatif yang diekspresikan PKS melalui iklan kampanye politiknya, maka PKS melakukan tahapan tindakan seperti, komunikasi dengan masyarakat atau konstituen langsung dari rumah kerumah atau komunikasi <i>door to door</i>, lalu membuka simpul massa PKS mengajak pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Selanjutnya PKS berbicara kepada masyarakat dengan berdasarkan <i>platform</i> partai sebagai tindak lanjut</p>
--	--	--

		<p>dari PKS mengajak bekerjasama dengan masyarakat. Dan yang terakhir membuat simpati-simpati masyarakat yang diharapkan membantu tercapainya target PKS dalam memenangi pemilu 2014.</p> <p>Ekspresi simbolik iklan PKS di media sosial yaitu membuat <i>grand strategy</i> untuk membuat <i>image</i>, <i>brand</i> dan citra dimata khalayak dalam memperluas segmentasi pemilih dari semua lapisan kalangan masyarakat. Lalu menunggangi gelombang yang sedang banyak dibicarakan dan memanfaatkan memontum untuk mencapai target <i>exposure</i> yang diinginkan.</p>
--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Media adalah alat yang dipergunakan untuk memudahkan pesan dari sumber (komunikator) kepada komunikasi (sipenerima). Media komunikasi dapat berbentuk saluran antar pribadi, media kelompok dan ada pula dengan media massa. Bentuk-bentuk media yang dapat

disebutkan antara lain media cetak, media elektronik, *electronic board*, komunikasi kelompok, saluran komunikasi publik.¹²

Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka yang bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.¹³

Menurut Lucian Pye¹⁴ komunikasi adalah jaring masyarakat manusia. Struktur sebuah sistem komunikasi dengan saluran-salurannya yang sedikit banyak terdefiniskan baik adalah seperti halnya kerangka dari tubuh sosial yang membungkusnya. Kandungan komunikasi merupakan sumber substansi dasar hubungan manusia. Aliran komunikasi menentukan arahan dan jejak perkembangan sosial yang dinamis. Pye menyarankan bahwa komunikasi memberikan suatu kerangka kerja hubungan-hubungan kekuasaan dan rasionalitas serta konsensus politik massa yang tersusun secara teratur dalam masyarakat.

Ketika perubahan zaman yang membuat masyarakat sekarang lebih modern, dan perkembangan teknologi muncul media baru yang dikenal sebagai media interaktif melalui komputer yang sering juga disebut internet (*international networks*). *Internet* adalah sesungguhnya penggabungan antara komputer, telepon, dan televisi. Hal yang tercipta oleh *internet* tersebut sangat khas, yaitu sebuah masyarakat yang

¹² P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2012), h. 167.

¹³ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: komunikator, pesan, dan media*, Penerjemah: Tjun Surjaman (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cetakan kelima, h. 6.

¹⁴ Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma* Penerjemah: Haris Munandar dan Dudy Priatna, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 304.

terbentuk oleh jaringan komputer, yang disebut sebagai masyarakat maya (*cyber space*)¹⁵.

Dengan didukungnya media baru berupa *internet*, dikeluarkannya alat komunikasi yang semakin canggih dan hampir semua masyarakat mempunyai alat komunikasi yang berupa Handphone yang berbagai macam model tampilan dan mempunyai kelebihan, masyarakat sekarang lebih senang berkomunikasi dan membaca informasi lewat media sosial, karena banyak berita yang langsung terupdate dan bisa secara langsung memberikan pendapat dan langsung mendapat respon, dibandingkan membaca berita lewat surat kabar.

Media sosial yang banyak dan sering digunakan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa adalah *facebook*. *Facebook* merupakan salah satu situs jejaring sosial yang semula adalah untuk interaksi sosial atau penyampaian informasi tentang sosial media, lambat laun menjadi komunitas di dunia maya (*virtual community*). Namun aktivitas jejaring sosial ini sangat tergantung dari kemudahan akses internet. Saat ini Indonesia menempati posisi kedua tertinggi pengguna *facebook* yaitu 35 jt user. Keistimewaan *facebook* menyediakan fitur-fitur yang dapat diakses oleh siapa saja yang menjadi anggota jejaring sosial tersebut.

Dalam media sosial, partisipasi politik semakin berkembang. Publik tidak hanya menjadi audiensi yang pasif, namun juga kerap memproduksi pesan politik. Menggunakan media sosial untuk mengekspresikan opini dan sikapnya. Menggalang solidaritas lewat

¹⁵Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), cetakan kedua, h. 159.

petisi, dukungan dimedia sosial hingga menciptakan agenda media sosial yang bisa mempengaruhi agenda media konvensional hingga agenda politik. Kampanye politik, analisis, penggalangan dukungan hingga perang opini di *Twitter* dan *facebook* menjadi hal yang biasa. Bahkan partisipasi kalangan *net generation* ini sampai pada serangan terhadap internet negara lain, melakukan *hacking*, *cracking* ataupun *phising*.

Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, aktivitas warga negara itu, meliputi pemberian suara (*voting*), menandatangani petisi, atau demonstrasi penutupan jalan. Partisipasi politik meliputi warga negara yang tidak termasuk sebagai politisi atau pejabat pemerintah termasuk pegawai negeri. Aktivitas yang dimaksud yang partisipasi politik ini bukanlah termasuk aktivitas menonton acara debat politik di televisi atau hanya interes tertarik dengan politik. Aktivitas berarti perilaku eksternal yang ditampakkan oleh warga negara melalui tindakan *voting*, petisi, dan sebagainya.¹⁶

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhakikat serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Dengan kata lain keikutsertaan warga negara

¹⁶Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi politik...* h. 71.

dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sangat diperlukan.¹⁷

Secara teoritis, dalam teori *Activist Rationality* partisipasi politik yang ada di suatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara tersebut. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa aktivitas atau tindakan minimum yang dilakukan warga negara dalam partisipasi politik. Semakin banyak warga negara yang aktif berpartisipasi dalam proses politik, semakin berkualitas pula demokrasi di negara tersebut.¹⁸

Menurut Herbert Mc. Closky¹⁹ seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson²⁰ dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

¹⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasia dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 63.

¹⁸ Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi politik, Media, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), cetakan kedua, h. 72.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...* h. 367.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...* h. 368.

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sudah populer dalam Ilmu Politik. Namun, demikian penggunaannya sering bermacam-macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar ilmuan politik bersepakat bahwa yang dimaksud partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan daripada kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk mempengaruhi proses perumusan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah²¹.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu suatu metode untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Data yang diperoleh berupa data sistematis, faktual, dan akurat, serta menunjukkan data yang otentik²². Jenis penelitian ini terlihat ingin menggambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah secara *holistic* guna membangun teori²³. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

²¹ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik, ...* , h. 92.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mujdi, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 24.

²³ Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa untuk Penelitian, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 94.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu²⁴:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada masyarakat desa Petir.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan Peraturan Perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dalam penelitian ini.²⁵

Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Petir yang terdapat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum...* h. 176.

b. Observarsi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.²⁶

Penulis melakukan pengamatan terhadap jenis media sosial yang berupa *facebook* yang memberikan informasi Pilkada dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode atau cara untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian²⁷.

Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen KPUD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2015.

²⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 26.

²⁷ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka penulis membagi skripsi menjadi lima bab yang terdiri dari:

- BAB I** : Yang membahas pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Penulis mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian yang meliputi Letak Geografis Desa Petir, Letak Demografis Desa Petir dan Kondisi Sosial.
- BAB III** : Di bahas kajian teori yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu Media Sosial (*Facebook*) yang meliputi Pengertian Media Sosial (*Facebook*) dan Urgensi dan Signifikansi Media Sosial (*Facebook*) sedangkan Partisipasi Politik meliputi Pengertian Partisipasi Politik Masyarakat, Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Masyarakat dan Tingkat Partisipasi Pemilih.
- BAB IV** : Menjadi bagian yang terpenting dalam penulisan skripsi ini. Karena dalam bagian ini diuraikan hasil penelitian yang berkenaan dengan Peran Media Sosial Terhadap Penujang Pilkada Pada Desa Petir dan Respon Masyarakat Desa Petir Terhadap Pemilihan Bupati Kabupaten Serang Tahun 2015 Melalui Media Sosial.

BAB V : Sebagai penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang penulis ajukan pada bab I. dan saran sebagai penyampaian kepada pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak.